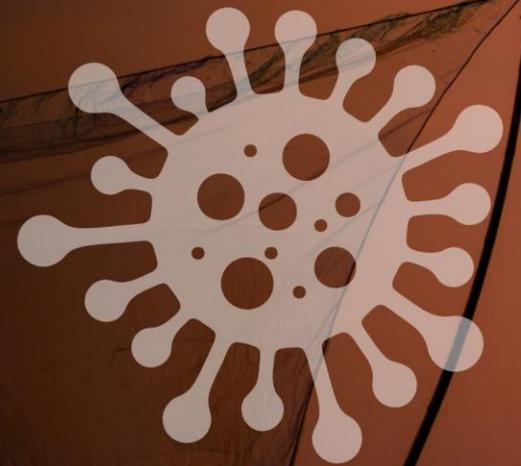


PRA RISET DAMPAK PANDEMI COVID 19

TERHADAP KEMISKINAN DI KAB. CIREBON



BAPPELITBANGDA
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2020





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah dapat menyelesaikan laporan pra riset “Dampak Covid-19 Terhadap Kondisi Kemiskinan Kabupaten Cirebon”. Dalam penyajiannya, laporan ini terdiri dari 3 (tiga) bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan, membahas mengenai latar belakang dampak dari penyebaran Covid-19 terhadap Kemiskinan di Kabupaten Cirebon, Bagian kedua, menjelaskan mengenai tinjauan pustaka terkait kemiskinan, Bagian ketiga, membahas mengenai metodologi penelitian dari kajian ini. Data-data yang digunakan, metologi penelitian, sistematika dari tahapan pengolahan dan anilisis data dituliskan dalam bagian ini.

Laporan ini merupakan laporan pra riset yang terdiri dari beberapa kegiatan fokus group discussion (FGD) dengan berbagai stakeholders pembangunan di Kabupaten Cirebon. Hasil kajian pra riset ini akan dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan riset pada tahun 2021.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih atas kontribusi dan kerjasama berbagai pihak dalam penyusunan laporan akhir ini. Semoga laporan akhir ini dapat memberikan gambaran mengenai seberapa besar dampak Covid-19 terhadap Kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Serta dasar dalam pelaksanaan riset pada tahun anggaran 2021.

Cirebon, Desember 2020

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Tujuan	5
1.3. Sasaran dan Manfaat Kajian	6
1.4. Keluaran	6
1.5. Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN TEORI DAN KONDISI UMUM KEMISKINAN KABUPATEN CIREBON	6
2.1. Kajian Teori	6
2.1.1. Definisi Kemiskinan	6
2.1.2. Indikator Kemiskinan	9
2. Asset dan kerentanan	11
2.1.3. Strategi Mata Pencaharian	13
2.1.4. Penanganan Kemiskinan dengan Pendekatan Livelihood Sustainable	18
2.2. Kondisi Umum Kemiskinan Kabupaten Cirebon	21
2.2.1. Kondisi Kemiskinan Konsumsi	21
1. Garis Kemiskinan	21
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (<i>Poverty Gap Index/P1</i>)	23
3. Indeks Keparahan Kemiskinan <i>Poverty severity index (P2)</i>	24
4. Ketimpangan	25
2.2.2. Kondisi Kemiskinan Non Konsumsi	26
1. Sektor Pendidikan	26
2. Sektor Kesehatan	28
3. Sektor Ketenagakerjaan	30
4. Sektor Infrastruktur Dasar	32
5. Sektor Perlindungan Sosial	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1. Pengumpulan Data	36



3.2. Metode Analisis Data ----- 36



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi permasalahan dalam pembangunan Kabupaten Cirebon, pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kabupaten tercatat sebanyak 217,64 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan 9,94 % angka ini menurun dari tahun 2018 yang masih dalam kondisi dua digit. Kondisi ini kemudian meningkat pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang mulai masuk Indonesia pada bulan maret 2020.

Berbagai studi memprediksi dampak pandemi Covid-19 akan berimbas kepada pelambatan ekonomi dan peningkatan angka kemiskinan. Universitas Oxford dan Goldman Sachs memprediksi adanya pelambatan ekonomi dunia sebesar -2,80 % dan -2,00 %. Dampak selanjutnya adalah 420 – 580 juta orang menjadi miskin dan 195 juta orang kehilangan pekerjaan.

Berdasarkan data resmi yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, rata-rata penambahan kasus positif baru sebesar 2.143 orang per hari sepanjang bulan Agustus 2020 di tingkat nasional. Sedangkan Provinsi Jawa Barat sebesar 147 orang. Kasus pertama terkonfirmasi di Indonesia pada bulan maret 2020 dan kemudian terus meningkat.

Langkah yang telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk memutuskan mata rantai penyebaran masyarakat yang terpapar Covid-19 adalah melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020, yang mulai diterapkan pada awal April 2020 sampai saat ini. PSBB mewajibkan masyarakat untuk beraktivitas di rumah, seperti: bekerja, belajar, beribadah, berolah raga dan aktivitas lainnya.

PSBB merupakan trade off antara ekonomi dan kesehatan, PSBB dianggap mampu menekan tingkat penyebaran penularan Covid-19 namun disisi lain akan mematikan perekonomian. Meskipun demikian, pada perkembangannya PSBB ini kemudian mengalami pelanggaran dengan istilah normal baru. Hanya beberapa institusi/perusahaan serta beberapa sektor saja yang diperbolehkan menjalankan aktivitas seperti biasanya (normal), seperti: kementerian/lembaga pemerintahan, bidang keamanan dan pertahanan, sektor kesehatan (termasuk farmasi), energi, komunikasi, pertanian/perkebunan dan sektor-sektor lainnya. Walaupun diperbolehkan untuk menjalankan aktivitas secara normal, namun tetap menerapkan protokol kesehatan seperti: physical distancing (menjaga jarak), menggunakan masker dan mencuci tangan secara periodic.



Pembatasan masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah di beberapa negara (lockdown) maupun PSBB yang dilakukan oleh pemerintah pusat/daerah, berdampak terhadap menurunnya aktivitas perekonomian. Pengukuran kinerja perekonomian suatu negara/wilayah menggunakan GDP (Gross Domestic Product) atau PDB (Produk Domestik Bruto) yang merupakan nilai pasar dari semua barang/jasa yang diproduksi oleh negara/wilayah dalam satu periode. Untuk mengetahui GDP suatu negara yang diakibatkan oleh Covid-19 sebaiknya dilihat dari seberapa besar pertumbuhan ekonomi di masa Covid-19 berbeda dari kondisi normalnya.

Informasi perbedaan GDP di beberapa negara dengan perbedaan tahun (2019 dan 2020), jika membandingkan antarkuartal (q1 dan q2) saat Covid-19 terjadi (periode tahun 2020) maka hanya 2 (dua) negara, China dan Vietnam yang mengalami pertumbuhan positif. Sisanya, 19 negara mengalami penurunan GDP, termasuk negara Indonesia. Namun, jika membandingkan kuartal yang berbeda dengan periode tahun yang berbeda maka akan terlihat perbedaan GDP saat Covid-19 terjadi.

Struktur PDRB dan Pertumbuhan PDRB Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha, Triwulan II-2020 (yoy). Sektor-sektor perekonomian di Provinsi Jawa Barat, hanya 4 (empat) sektor dari 17 (tujuh belas) sektor yang mengalami pertumbuhan positif. Sektor informasi dan komunikasi mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi sebesar 39,75%; pengadaan air tumbuh sebesar 9,21%; sektor pertanian 7,64% serta jasa pendidikan sebesar 6,86%. Keempat sektor tersebut mengalami pertumbuhan positif karena kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait pembatasan sosial berskala besar. Sehingga interaksi dalam bekerja dan belajar sangat tergantung kepada pelayanan jasa informasi dan telekomunikasi.

Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Cirebon, dengan struktur ekonomi yang mirip dengan Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Cirebon akan menghadapi berbagai permasalahan sebagai dampak dari pandemi covid-19 terutama pada sektor ekonomi yang berimbas pada penurunan kesejahteraan dan peningkatan angka kemiskinan.

1.2. Tujuan

Kajian mengenai dampak Covid-19 terhadap Kemiskinan di Kabupaten Cirebon ini secara umum bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dampak



Covid-19 terhadap kondisi kemiskinan penduduk Kabupaten Cirebon baik konsumsi maupun non konsumsi. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi pengaruh Covid-19 terhadap pencapaian indikator kemiskinan di Kabupaten Cirebon.
2. Mengetahui akar masalah dampak pandemi covid-19 terhadap dimensi kemiskinan.
3. Memberikan rekomendasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon Pasca Covid-19.

1.3. Sasaran dan Manfaat Kajian

Kajian ini memiliki sasaran dan manfaat, dimana diharapkan dapat menghasilkan output kegiatan yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Sasaran tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Analisis mendalam dampak Covid-19 terhadap kondisi kemiskinan di Kabupaten Cirebon
2. Tersedianya analisis dampak pada berbagai dimensi kemiskinan yang terdampak Covid di Kabupaten Cirebon.
3. Memberikan masukan program penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan akar permasalahan

1.4. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari kajian ini adalah analisis dampak krisis Covid-19 terhadap kondisi kemiskinan di Kabupaten Cirebon yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengambilan kebijakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang sesuai.

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan ini terdiri dari tiga bagian, bagian pertama menguraikan mengenai latar belakang, penyusunan rumusan masalah yang menjadi landasan dilakukannya kajian, tujuan, sasaran dan keluaran kajian. Bagian kedua berisi kajian pustaka dan kondisi kemiskinan Kabupaten Cirebon. Bagian ketiga berisi mengenai metodologi, spesifikasi model penelitian beserta jenis dan sumber data variabel yang digunakan.

BAB II KAJIAN TEORI DAN KONDISI UMUM KEMISKINAN KABUPATEN CIREBON

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Definisi Kemiskinan



Salah satu tujuan pembangunan di Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan. Tujuan pencapaian kesejahteraan ini disebabkan karena adanya kemiskinan. Sejak tahun 1974 sampai dengan sekarang pemerintah Indonesia meluncurkan program-program penanggulangan kemiskinan. Kurun waktu tahun 1974-1988 pemerintah meluncurkan program penanggulangan kemiskinan berbasis pertanian dan industri. Kurun waktu 1988-1998 pemerintah meluncurkan program penanggulangan kemiskinan berbasis pengembangan kawasan. Kurun waktu 1998- sekarang pemerintah meluncurkan program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat.

Konsep kemiskinan bersifat majemuk atau tidak tunggal. Terdapat berbagai teori dalam memahami kemiskinan. Secara garis besar dalam paradigma kebijakan sosial teori kemiskinan dibagi menjadi dua paradigma yakni paradigma neoliberal dan demokrasi sosial (Suharto 2005). Dua paradigma menjadi landasan blue print dalam menganalisis kemiskinan maupun merumuskan kebijakan-kebijakan dan program-program anti kemiskinan.

Dalam pandangan kaum neoliberal, kemiskinan merupakan persoalan individu yang diakibatkan kelemahan dan pilihan individu yang bersangkutan. Dalam pandangan teori demokrasi sosial kemiskinan bukanlah persoalan individual, melainkan struktural. Kemiskinan disebabkan adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber-sumber kemasyarakatan.

Kemiskinan merupakan suatu konsep yang multidimensional artinya kemiskinan tidak hanya dapat dilihat dari sisi ekonomi tapi juga dapat dilihat dari segi sosial, budaya, dan politik. Sejalan dengan pemahaman tersebut definisi kemiskinan ini semakin berkembang. Papilaya (2006) mengemukakan bahwa pada awal 1990-an definisi kemiskinan telah diperluas tidak hanya berdasarkan tingkat pendapatan tetapi mencakup ketidakmampuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan perumahan.

Dalam pengertian umum menurut Suryawati (2004) kemiskinan adalah situasi dan kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup. Lebih lanjut menurut Suryawati kemiskinan dapat dilihat ketidakberdayaan secara sosial maupun politik. Pandangan Suryawati mengindikasikan bahwa kemiskinan dapat diukur dalam dua aspek yakni kemampuan dalam menyediakan bahan pokok dan akses terhadap kondisi sosial dan politik.

Suparlan (1984) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu standar hidup yang rendah yaitu suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau



segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Suparlan,1984).

Dalam pandangan Chambers menerangkan bahwa kemiskinan merupakan suatu kesatuan konsep (integrated concept) yang memiliki lima dimensi, pertama kemiskinan (Proper) yakni ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan. Kedua, ketidakberdayaan (Powerless) yakni rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (social power) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketiga, kerentanan menghadapi situasi darurat (State of emergency) yakni ketidakmampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Keempat, ketergantungan (dependency) yakni kemiskinan telah menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Kelima keterasingan (Isolation) yakni kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor lokasi atau geografi.

Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPPENAS, 2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Untuk mewujudkan hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang miskin Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan kemampuan dasar (human capability approach) dan pendekatan objective and subjective.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need approach) untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional mendefinisikan miskin berdasarkan konsep atau pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu keluarga prasejahtera



(KPS), keluarga sejahtera I (KS-I), keluarga sejahtera II (KS-II), keluarga sejahtera III (KS-III), dan keluarga sejahtera III plus (KS-III Plus). Keluarga miskin Berdasarkan kriteria ini keluarga miskin atau keluarga prasejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan pokok (pangan), sandang, papan, kesehatan, dan pengajaran agama. Mereka yang dikategorikan sebagai KPS adalah keluarga yang tidak.

Atas berbagai konsep yang telah disajikan dapat ditarik sebuah rumusan bahwa point penting dari kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang atau keluarga terkait dengan pemenuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Selain itu kemiskinan diidentikan dengan ketidakmampuan seseorang atau keluarga dalam mengakses sumberdaya termasuk akses sosial politik dan kerentanan terhadap keamanan.

2.1.2. Indikator Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena yang tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, memahami kemiskinan tidak bisa dilihat dalam satu sudut pandang. Begitupun dalam menetapkan indikator-indikator kemiskinan. Terdapat beberapa model pendekatan dalam mengukur kemiskinan antara lain yaitu:

a. Model Tingkat Konsumsi

Sayogyo (1971) menggunakan tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapita sebagai indikator kemiskinan. Dalam pandangan Sayogyo ekuivalen konsumsi beras dibedakan menjadi dua yakni ekuivalen konsumsi beras daerah pedesaan dan perkotaan. Ambang batas kemiskinan daerah pedesaan berdasarkan ekuivalen konsumsi beras adalah 240 Kg per orang per tahun. Artinya jika masyarakat pedesaan mengkonsumsi kurang dari 240 Kg per orang per tahun maka masuk dalam kategori miskin. Sedangkan untuk daerah perkotaan ditentukan sebesar ekuivalen 360 kg beras per orang pertahun. Hampir sejalan dengan model konsumsi beras dari sayogyo, Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung angka kemiskinan lewat tingkat konsumsi penduduk atas kebutuhan dasar. Perbedaannya adalah bahwa BPS tidak menyertakan kebutuhan-kebutuhan dasar dengan jumlah beras. Dari sisi makanan, BPS menggunakan indikator yang direkomendasikan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1998 yaitu 2.100 kalori per orang per hari, sedangkan dari sisi kebutuhan non-makanan tidak hanya terbatas pada sandang dan papan melainkan termasuk pendidikan dan kesehatan.

b. Model Kejahteraan Keluarga



Model ini digunakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam memetakan kemiskinan. BKKBN dalam memahami kemiskinan lebih melihat dari sisi kesejahteraan dibandingkan dari sisi kemiskinan itu sendiri. Unit survey dan analisis yang digunakan BKKBN menggunakan keluarga. Data kemiskinan dilakukan melalui pentahapan keluarga sejahtera yang dibagi menjadi lima tahap, yaitu Keluarga Pra Sejahtera (sangat miskin), Keluarga Sejahtera I (miskin), Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III dan Keluarga Sejahtera III plus.

c. Model Pembangunan Manusia

Model ini dikampanyekan dipromosikan oleh Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk program pembangunan (United Nation Development Program/UNDP). Model yang digunakan adalah melalui Laporan tentang Pembangunan Manusia atau yang sering disebut Human Development Report (HDR) Pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) selanjutnya mengembangkan model ini. HDR yang pertama dibuat pada tahun 1996 untuk situasi tahun 1990 dan 1993. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993 telah menjadikan model ini sebagai model pembangunan nasional yang disebut sebagai “Pembangunan Manusia Seutuhnya”. HDR berisikan penjelasan tentang empat index yaitu index Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI), Index Pembangunan Jender atau Gender Development Index (GDI), Langkah Pemberdayaan Jender atau Gender Empowerment Measure (GEM) dan Index Kemiskinan Manusia atau Human Poverty Index (HPI). Indikator HDI adalah tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf orang dewasa, rata-rata lama bersekolah, dan tingkat daya beli perkapita. Indikator HPI, adalah kelahiran yang tidak dapat bertahan sampai usia 40 tahun, tingkat buta huruf orang dewasa, persentase penduduk yang tidak memiliki akses pada air yang aman untuk digunakan, persentase penduduk yang tidak memiliki akses pada fasilitas kesehatan, dan persentase balita yang kurang makan. Indikator GDI adalah adalah tingkat harapan hidup laki-laki dan perempuan, tingkat melek huruf orang dewasa laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah untuk laki-laki dan perempuan, serta perkiraan tingkat pendapatan laki-laki dan perempuan. Sedangkan indikator GEM indikatornya adalah persentase jumlah anggota DPR dari laki-laki dan perempuan, persentase jumlah pegawai tingkat senior, manajer, profesional dan posisi teknis dari laki-laki dan perempuan, serta perkiraan tingkat pendapatan laki-laki dan perempuan.

Untuk mengetahui angka kemiskinan dilakukan dengan melihat beberapa aspek sebagai berikut:



a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Mengukur pencapaian suatu wilayah dalam tiga dimensi pembangunan manusia yang paling esensial-lama hidup, tingkat pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Indeks tersebut dihitung dengan angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita.

b. Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)

Mengukur dimensi yang berlawanan arah dari IPM, yaitu seberapa besar penduduk yang kurang beruntung, tertinggal (deprived people), karena tidak mempunyai akses untuk mencapai standar kehidupan yang layak. Indeks tersebut dihitung menggunakan prosentase penduduk yang tidak mencapai usia 40 tahun, prosentase penduduk buta huruf, prosentase balita dengan status gizi kurang, prosentase balita dengan status gizi kurang, prosentase penduduk tidak punya akses pada pelayanan kesehatan dasar, sanitasi air bersih. Semakin besar penduduk suatu wilayah pada situasi ini dipresentasikan oleh IKM yang semakin tinggi.

c. Indeks Kehidupan Fakir Miskin

Mengukur kesenjangan pencapaian, yaitu berapa upaya, dalam prosentase, yang masih harus dilakukan/dicapai untuk membawa kondisi kehidupan fakir miskin di suatu wilayah menuju standar kehidupan minimum yang layak. Dimensi yang diukur mencakup (a) situasi kelaparan atau sangat kurang kalori, (b) Kualitas hidup fakir miskin, (c) Akses fakir miskin pada pelayanan sosial dasar dan pembangunan.

2. Asset dan kerentanan

Dalam tahap yang lebih maju untuk memahami kemiskinan, para sarjana menggunakan sebuah konsep yang disebut kerentanan. Meskipun kerentanan terkait erat dengan kemiskinan, banyak yang berpendapat bahwa kedua istilah ini tidak sama. Sementara kemiskinan dianggap sebagai suatu konsep statis, kerentanan lebih dinamis yang menangkap proses perubahan dari orang-orang yang bergerak masuk dan keluar dari kemiskinan. Secara kasarnya, meskipun orang-orang miskin biasanya yang paling rentan, tidak semua orang rentan miskin (Moser 1998).

Menurut Chambers (1995) konsep kerentanan terdiri dari eksternal (Stres, guncangan, dan resiko) dan sisi internal (tidak adanya pertahanan, perasaan kurangnya harta untuk menanggulangi tanpa menimbulkan kerugian). Apa yang dimaksud dengan kerugian mungkin ada berbagai versi seperti lemah fisik, miskin ekonomi, ketergantungan sosial, dipermalukan, atau terganggunya psikologis.



Berangkat dari konteks yang dibahas di bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pendapatan konsumsi dalam memahami kemiskinan bisa menipu. "Ratusan juta kerentanan telah meningkat dan mata pencaharian berkelanjutan mereka kurang terjamin hingga pendapatan mereka telah naik. Dalam kasus orang-orang yang seharusnya menjual asset mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar karena kekurangan pendapatan misalnya, pendekatan pendapatan/konsumsi tidak melihat masalah apapun. Lain halnya dengan pendekatan kerentanan, karena kehilangan asset akan selalu membawa konsekuensi mengurangi keamanan. Contoh lain adalah kasus aktivitas pinjaman. Sementara kemiskinan (diukur dari pendapatan) dapat dikurangi dengan pinjaman, hutang tersebut membuat masyarakat miskin lebih rentan. (Wratten 1995). Oleh Karena itu kerentanan berkaitan erat dengan asset kepemilikan. Semakin banyak asset yang dimiliki semakin berkurang kerentanan mereka, dan semakin besar erosi asset masyarakat, semakin besar rasa tidak aman mereka (Moser 1998)

Penelitian mendefinisikan kerentanan sebagai rasa tidak aman dan kepekaan dalam kesejahteraan individu, rumah tangga, dan masyarakat dalam menghadapi lingkungan yang berubah, dan mutlak dalam hal ini, ketanggapan dan ketahanan mereka terhadap resiko yang mereka hadapi seperti selama perubahan negative (Moser 1998). Perspektif lain diusulkan oleh Program Pangan Dunia (WFP) bahwa pandangan kerentanan sebagai fungsi dari eksposur risiko dan ketidakmampuan untuk mengatasinya. Menurut WFP kerentanan sama dengan eksposur risiko plus ketidakmampuan untuk mengatasi (Mani 2001).

Anggapan definisi kemiskinan yang lebih subjektif tidak jarang didasarkan pada pendapatan-konsumsi dan kerentanan yang menangkap proses perpindahan orang-orang keluar masuk dari kemiskinan, Chamber menunjukkan bahwa kebalikan dari kemiskinan tidak harus kaya, tapi keamanan (Rakodi 1995).

Pembahasan hubungan antara kepemilikan asset dan kerentanan yang dieksplorasi oleh misalnya Moser (1998) atau Wratten (1995) juga akan membawa kita ke dalam diskusi tentang jenis asset orang-orang miskin dan bagaimana mereka berusaha untuk mengatasi masalah mereka dalam kemiskinan. Pemikiran tersebut berasal dari kenyataan bahwa meskipun masalah kekurangan uang tunai, masyarakat miskin punya bahan lain non materi-aset mereka seperti kesehatan, tenaga kerja, pengetahuan keterampilan mereka, teman mereka dan keluarga, dan sumber daya alam di sekitar mereka (Rakodi 2002).

Meskipun kadang-kadang muncul dalam terminology yang berbeda, umumnya aktiva dikelompokkan menjadi lima: modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal keuangan, modal alam. Mengadopsi ide Carney, Rakodi (2002) menjelaskan lima asset sebagai berikut :



- a. Modal Manusia. Modal manusia adalah sumber daya tenaga kerja yang tersedia untuk rumah tangga, yang memiliki dimensi kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama merujuk pada jumlah anggota rumah tangga dan waktu yang tersedia untuk terlibat dalam kegiatan mencari nafkah. Aspek kuantitatif mengacu pada tingkat pendidikan dan keterampilan dan status kesehatan anggota rumah tangga.
- b. Modal Sosial dan Politik. Modal sosial dan politik adalah sumber daya sosial (jaringan, keanggotaan kelompok, kepercayaan dan hubungan timbal balik, akses ke lembaga yang lebih luas dari masyarakat) di mana orang-orang mengejar mata pencaharian.
- c. Modal Fisik. Modal fisik atau produksi adalah infrastruktur dasar (transportasi, tempat tinggal, air, energi, dan komunikasi) dan peralatan produksi dan sarana yang memungkinkan orang untuk mengejar mata pencaharian mereka.
- d. Modal Keuangan. Modal keuangan adalah modal keuangan yang tersedia bagi orang-orang (termasuk tabungan, kredit, remittance, dan pension) yang tersedia dengan pilihan mata pencaharian yang berbeda.
- e. Modal Alam. Modal alam adalah modal sumber daya alam yang berguna bagi kehidupan termasuk tanah, air, dan sumber daya lingkungan lainnya, khususnya sumber daya kolam umum.

2.1.3. Strategi Mata Pencaharian

Kami telah membahas sejauh mungkin tentang pendekatan yang lebih objektif dalam pemahaman kemiskinan yang tidak hanya melihat kemiskinan sebagai masalah pendapatan atau konsumsi. Perspektif ini bertepatan dengan konsep kehidupan yang menempatkan pendapatan sebagai salah satu komponen dari beberapa orang lain ketika berbicara tentang kelanjutannya. Menurut De Haan (2002) mata pencaharian belum tentu sama dengan memiliki pekerjaan bahkan tidak ada hubungannya dengan bekerja. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa seseorang dengan pendapatan lebih rendah bisa lebih baik daripada seseorang dengan pendapatan yang lebih tinggi. Pendapatan hanya salah satu komponen dalam konteks mata pencaharian yang mungkin masuk kerentanan, kurangnya rasa kesadaran, tingkat kesehatan, melek huruf, pendidikan dan akses terhadap asset (Farrington et al 1999).

Mata pencaharian berkelanjutan apabila memberikan dua hal dasar, yaitu kemampuan untuk bertemu dan memenuhi kebutuhan dasar diri didefinisikan di



satu sisi, dan keamanan terhadap guncangan (yang melakukan kekerasan dan datang tiba-tiba) dan tekanan kekerasan yang berlangsung lama) di sisi lainnya. Mata pencaharian berkelanjutan juga berarti bahwa ia mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan kemampuan dan aset di waktu sekarang maupun waktu mendatang. Departemen Pembangunan Internasional (DFID) mengusulkan kerangka mata pencaharian berkelanjutan atau kerangka SL. Berdasarkan kerangka, Farrington berpendapat bahwa faktor kunci untuk mendukung perjuangan melawan kemiskinan adalah bagaimana untuk memperkuat aset mata pencaharian orang-orang miskin.

Agar aman atau mempertahankan penghidupan mereka masyarakat miskin menerapkan strategi bertahan hidup yang berbeda. Rakodi (1995) merangkum strategi untuk mempertahankan penghidupan berdasarkan karya Tostensen (1990) di Mali, beberapa diantaranya: diversifikasi pendapatan rumah tangga seperti menyewa kamar, salah satu anggota rumah tangga bekerja lebih dari satu aktifitas dan banyak lagi dari satu anggota rumah tangga bekerja melibatkan perempuan dan anak-anak. Bagaimana mengurangi kerentanan orang miskin tergantung pada bagaimana mereka mengolah aset-aset mereka. Moser (1998) mengatakan bahwa kemampuan untuk menghindari atau mengurangi kerentanan tidak hanya tergantung pada aset awal, tapi juga kapasitas untuk mengelolanya untuk mengelolanya menjadi pendapatan, makanan atau kebutuhan dasar lainnya.

Tabel 2. 1 Strategi Rumah Tangga Untuk Memobilisasi Aset Dalam Menanggapi Perubahan

Jenis aset	Respon rumah Tangga
Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan jumlah wanita yang bekerja, terutama di sector formal2. Mengalokasikan bagian waktu perempuan yang tidak proporsional untuk memenuhi tanggung jawab3. Mengalokasikan lebih banyak waktu untuk memperoleh layanan sebagai respons terhadap menurunnya kualitas infrastruktur4. Meningkatkan ketergantungan pada pekerja anak
Perumahan	<ol style="list-style-type: none">1. Diversifikasi pendapatan melalui usaha di rumah dan sewa2. Mengadopsi strategi identifikasi antar plot rasional untuk menampung rumah tangga anak



Jenis asset	Respon rumah Tangga
Infrastruktur sosial dan ekonomi	Pengganti swasta untuk barang dan layanan publik
Hubungan Rumah Tangga	1. Meningkatkan ketergantungan pada jaringan dukungan keluarga 2. Meningkatkan migrasi tenaga kerja dan pengiriman uang
Modal sosial	1. Meningkatkan kepercayaan pada pengaturan kredit informal 2. Meningkatkan jaringan dukungan informal di antara rumah tangga 3. Meningkatkan kegiatan di tingkat masyarakat

Sumber: Moser (1998)

Ringkasan selanjutnya disediakan oleh Mani (2001) yang mencoba untuk menunjukkan keterkaitan antara kepemilikan asset dan proses penurunan dan peningkatan kerentanan dari Moser (1996) seperti yang terlihat di tabel di bawah ini.

Tabel 2. 2 Indikator Potensi Peningkatan Dan Penurunan Kerentanan Bagi Individu, Rumah Tangga, Dan Masyarakat

Jenis kerentanan	Indikator Peningkatan Kerentanan	Indikator penurunan Kerentanan
Individu		
Tenaga Kerja	1. Kehilangan pekerjaan tetap 2. Penurunan Upah Kerja 3. Kenaikan jangka pendek, kerja kausal, upah minimum 4. Akuisisi cacat fisik	a. Peningkatan kerja anggota rumah tangga, khususnya perempuan b. Peningkatan usaha rumahan c. Peningkatan pekerjaan yang dimiliki oleh pekerja secara individu
Modal manusia	1. Penurunan akses atau kualitas infrastruktur sosial dan ekonomi	a. Pergantian swasta untuk pelayanan publik, seperti pompa



Jenis kerentanan	Indikator Peningkatan Kerentanan	Indikator penurunan Kerentanan
	2. Penurunan kehadiran di sekolah atau peningkatan angka putus sekolah 3. Penurunan kehadiran klinik kesehatan	air, perawatan kesehatan swasta, dan pendidikan swasta
Rumah tangga		
Perumahan	1. Peningkatan persepsi ancaman penggusuran 2. Menurunnya stok perumahan 3. tingkat kepadatan tinggi	a. Resolusi kepemilikan tidak aman b. Penggunaan plot untuk antargenerasi "sekumpulan"
Hubungan Rumah Tangga	1. Erosi rumah tangga sebagai unit sosial karena perubahan struktur, kerusakan perkawinan, atau split rumah tangga 2. ekstensi Rumah Tangga yang mengurangi rasio pendapatan untuk non pendapatan terutama penambahan "tersembunyi (ibu menikah atau berpisah)" kepala rumah tangga perempuan 3. Ketidakmampuan perempuan untuk menyeimbangkan tanggung jawab dan partisipasi masyarakat 4. Anak yang lebih tua jadi penitipan anak 5. Kurangnya pengasuh lansia 6. Peningkatan kekerasan dalam rumah tangga	a. Ekstensi Rumah Tangga yang meningkatkan rasio pendapatan-non pendapatan b. Berbagi penitipan anak, memasak, dan ruang c. Pengurangan dalam kekerasan domestik
Masyarakat		



Jenis kerentanan	Indikator Peningkatan Kerentanan	Indikator penurunan Kerentanan
Modal Sosial	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan rasa tidak aman masyarakat di tempat umum2. Penurunan resiprositas antar-rumah tangga3. Erosi dari organisasi di tingkat masyarakat	<ol style="list-style-type: none">a. Masyarakat berbasis solusi kejahatanb. Resiprositas di dalam rumah tanggac. Masyarakat aktif berbasis organisasi

Sumber: Moser (1996)

Cara lain untuk mempertahankan mata pencaharian adalah membangun dan memperkuat asset. Ide ini di dukung oleh thesis Moser yang menyatakan kerentanan terkait erat dengan kepemilikan asset, dalam arti “semakin banyak asset, semakin kurang kerentanan dan semakin banyak asset berkurang, semakin banyak tingkat kerawanan.” (Moser 1998)

Untuk mengatasi kekurangan modal manusia yang membuat orang miskin memiliki akses terbatas terhadap pekerjaan formal di satu pihak, dan pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan yang membuat mereka bahkan lebih sulit untuk bersaing, bekerja di sector informal akan terlihat sebagai satu-satunya pilihan bagi kelompok miskin dan rentan. Korelasi antara pertumbuhan masyarakat (bersamaan dengan kurangnya kemampuan dari sector formal untuk menyerap peningkatan pertumbuhan tenaga kerja masyarakat) dan pilihan orang-orang miskin untuk mengandalkan sector informal ini digarisbawahi oleh Friedmann (1992) dan Stern (2004) meskipun banyak yang menyadari bahwa sebuah sector memberikan produktivitas yang lebih rendah, begitu juga dengan pendapatan (Hart 1971 dalam Van Dijk 1996)

Pengetahuan lain menyatakan secara luas tentang strategi masyarakat miskin untuk mengatasi kerentanan adalah mengembangkan jaringan informal sebagai salah satu bentuk penguatan modal sosial. Sebuah penelitian tentang bagaimana mengatasi masyarakat miskin dengan kerentanan dan krisis yang dilakukan oleh Mukherjee di Indonesia menemukan bahwa orang miskin cenderung mengandalkan dukungan satu sama lain dan kelompok-kelompok swadaya atau lembaga-lembaga local yang mereka bentuk sendiri. Lembaga-lembaga lokal yang sering ditemukan di Indonesia adalah dalam bentuk doa mingguan dan pengajian (agama, kelompok belajar), arisan (perputaran kelompok tabungan dan kredit), dan jimpitan (satu cangkir beras atau uang tunai yang dikumpulkan dari pintu ke pintu) (Mukherjee 2002).



Bagi para sarjana, modal sosial diyakini menjadi alat untuk mengembangkan modal lain atau asset dari orang miskin. Melalui modal sosial, masyarakat miskin akan dapat mengembangkan modal manusia maupun modal keuangan (Coleman 1988 dalam Johnston dan Percy-Smith 2003).

2.1.4. Penanganan Kemiskinan dengan Pendekatan Livelihood Sustainable

Tujuan utama dalam pembangunan di Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Hal ini merupakan amanah konstitusi, sehingga derap langkah pembangunan di Indonesia ditujukan penciptaan kesejahteraan. Indikator utama dalam melihat kesejahteraan adalah fenomena kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah senantiasa menggulirkan program-program antikemiskinan.

Dalam konteks pembangunan dan penanggulangan kemiskinan setidaknya ditemukan dua konsep besar. Pertama pembangunan yang bersifat top down dan bottom up. Dalam konteks kekinian pemerintah cenderung menggunakan pendekatan bottom up. Filosofi pembangunan berparadigma bottom up adalah partisipasi masyarakat atau pelibatan masyarakat dalam pembangunan khususnya dalam pengentasan kemiskinan. Secara operasional pendekatan bottom up dilakukan dengan melalui livelihood sustainable approach (SLA) atau pendekatan penghidupan berkelanjutan.

Livelihood Sustainable Approach (SLA) pada prinsipnya merupakan adalah cara untuk meningkatkan pemahaman tentang mata pencaharian masyarakat miskin. Konsep SLA mulai dikembangkan tahun 1990 oleh *Department for international development* (DFID), selanjutnya pada tahun 1999 DFID memberikan kerangka konseptual yang menjadi perumusan program-program aksi implementasi proyek pemberantasan kemiskinan dan keterbelakangan yang diakui terjadi dibanyak negara berkembang (DFID, 1999).

Menurut Oliver Serrat (2008), *the sustainable livelihood approach (SLA) is the process by which rural families construct a diverse portfolio of activities and social support capabilities in their struggle for survival and in order to improve their standards of livings*. Hal ini didukung oleh Shadi Hamadeh(2009), yang menyatakan bahwa *“The sustainable livelihoods approach is a way of thinking about the objectives, scope, and priorities for development activities*. Dengan pendekatan SLA (*the sustainable livelihood approach*), proses dan evaluasi dilaksanakan secara partisipatif. Livelihood dikatakan sustainable apabila dapat dipadukan untuk meredam goncangan, stress dan resiko, mempertahankan bahkan mengembangkan aset yang dimiliki serta dalam pendayagunaannya tidak memberikan resiko dan ancaman bagi kelestarian alam (Nugroho, 2011)



Kata kunci pengentasan kemiskinan dalam konsep SLA adalah masyarakat. Artinya masyarakat dilihat sebagai objek dari kemiskinan dan masyarakatpun sebagai subjek atas penanganan kemiskinan. Hal penting atas konsep SLA adalah melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Kartasasmita 1996).

Dalam pandangan Parson, et al. (1994) dalam Suharto (2005) bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam setingan pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual; meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengaitkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya.

Pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*) yaitu: (1) Aras Mikro: Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*); (2) Aras Mezzo: Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. (3); Aras Makro: Pendekatan ini disebut juga pendekatan strategi sistem besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak (Parson, et al. 1994 dalam Suharto 2005).



Schuler et al. dalam Suharto (2005) mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka menyangkut kemampuan ekonomi, mengakses manfaat kesejahteraan dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan yaitu: 'kekuasaan di dalam (power within), 'kekuasaan untuk' (power to), 'kekuasaan atas' (power over) dan 'kekuasaan dengan.' Adapun pengembangan keberdayaan adalah sebagai berikut:

- a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau tempat tinggalnya.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari.
- c. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier.
- d. Terlibat dalam membuat keputusan domestik atau publik.
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga atau masyarakat.
- f. Kesadaran hukum atau politik.
- g. Keterlibatan dalam kampanye atau protes-protes.
- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.

Ukuran keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat adalah partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam program-program pengentasan kemiskinan. Deshler dan Sock, (1985) dalam Ditjen Cipta Karya (2008) disebutkan bahwa secara garis besar terdapat tiga tipe partisipasi, yaitu: partisipasi teknis (technical participation), partisipasi semu (pseudo participation) dan partisipasi politis atau partisipasi asli (genuine participation).

Berdasarkan asumsi tersebut Mikkelsen (1996) dalam Soetomo (2008) membedakan adanya empat pendekatan untuk mengembangkan partisipasi masyarakat yaitu:

- a. Pendekatan partisipasi pasif. Pendekatan ini didasarkan bahwa pihak eksternal yang lebih tahu, lebih menguasai pengetahuan, teknologi, skill dan sumberdaya. Dengan demikian, bentuk partisipasi ini akan melahirkan tipe komunikasi satu arah, dari atas ke bawah, hubungan pihak eksternal dan masyarakat lokal bersifat vertikal.
- b. Pendekatan partisipasi aktif. Dalam pendekatan ini sudah dicoba dikembangkan komunikasi dua arah, walaupun pada dasarnya masih berdasarkan pada anggapan yang sama dengan pendekatan yang pertama, bahwa pihak eksternal lebih tahu dibandingkan masyarakat lokal.



- Pendekatan ini sudah mulai membuka dialog, guna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinteraksi secara intensif dengan para petugas dari institusi eksternal. Salah satu contohnya adalah pendekatan pelatihan dan kunjungan.
- c. Pendekatan partisipatif dengan keterikatan. Pendekatan ini mirip kontrak sosial antara pihak eksternal dengan masyarakat lokal. Dalam keterikatan tersebut dapat disepakati apa yang dapat dilakukan masyarakat lokal dan apa yang harus dilakukan dan diberikan pihak eksternal. Dalam model ini masyarakat setempat mempunyai tanggung jawab terhadap pengelolaan kegiatan yang telah disepakati dan mendapat dukungan dari pihak eksternal baik finansial maupun teknis.
 - d. Partisipasi atas permintaan setempat. Bentuk ini mencerminkan kegiatan pembangunan atas dasar keputusan yang diambil oleh masyarakat setempat. Kegiatan dan peranan pihak eksternal lebih bersifat menjawab kebutuhan yang diputuskan dan dinyatakan oleh masyarakat lokal, bukan kebutuhan berdasarkan program yang dirancang dari luar.

2.2. Kondisi Umum Kemiskinan Kabupaten Cirebon

2.2.1. Kondisi Kemiskinan Konsumsi

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

1. Garis Kemiskinan

GK Kabupaten Cirebon terus meningkat setiap tahunnya, artinya standar untuk menjadi penduduk tidak miskin terus meningkat. Hal ini akan meningkatkan jumlah penduduk dan persentase penduduk miskin bila tidak dibarengi dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Tabel 2. 3 Pertumbuhan GK Kabupaten Cirebon, Prov. Jawa Barat Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Cirebon	327.032	333.758	346.240	370.747	381.372
Provinsi Jawa Barat	306.876	324.992	344.427	367.755	386.198

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

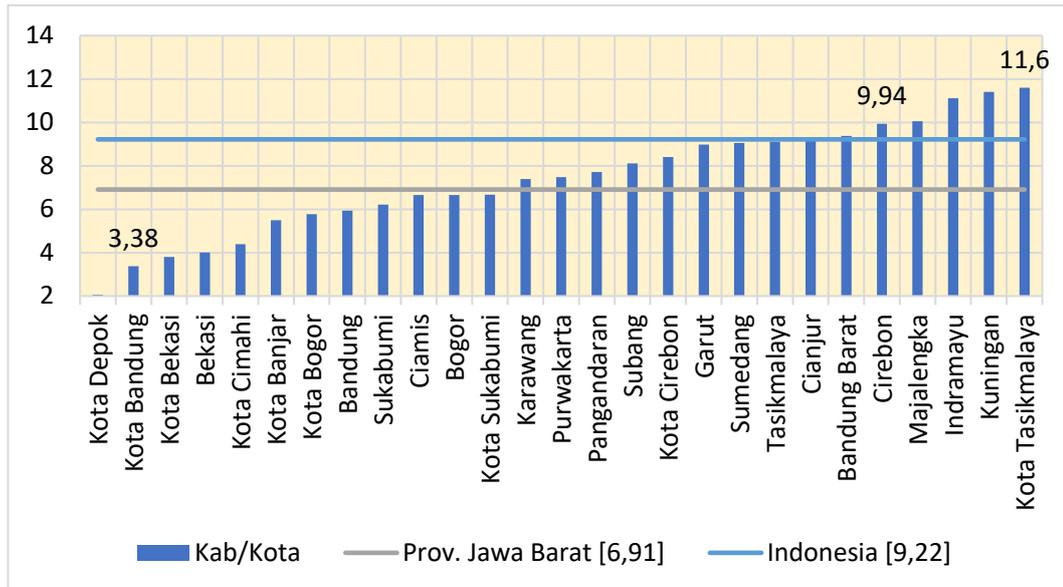
Dari tabel di atas terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir GK Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat terus meningkat, dan posisi GK Kabupaten Cirebon di atas Jawa Barat, artinya standar untuk menjadi penduduk tidak miskin di Kabupaten Cirebon lebih tinggi.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar 2. 1 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin (ribuan) dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Cirebon Tahun 2015-2019

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Kabupaten Cirebon telah mampu menurunkan 95,57 ribu penduduk miskin dari 313,21 ribu pada tahun 2015 menjadi 217,64 ribu pada tahun 2019. Persentase penduduk miskin sudah menyentuh angka satu digit, pada tahun 2015 nilai P0 masih sebesar 14,77 % kemudian menurun secara presisten dan mencapai 9,94 % pada tahun 2019 atau menurun sebesar 4,83 %.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

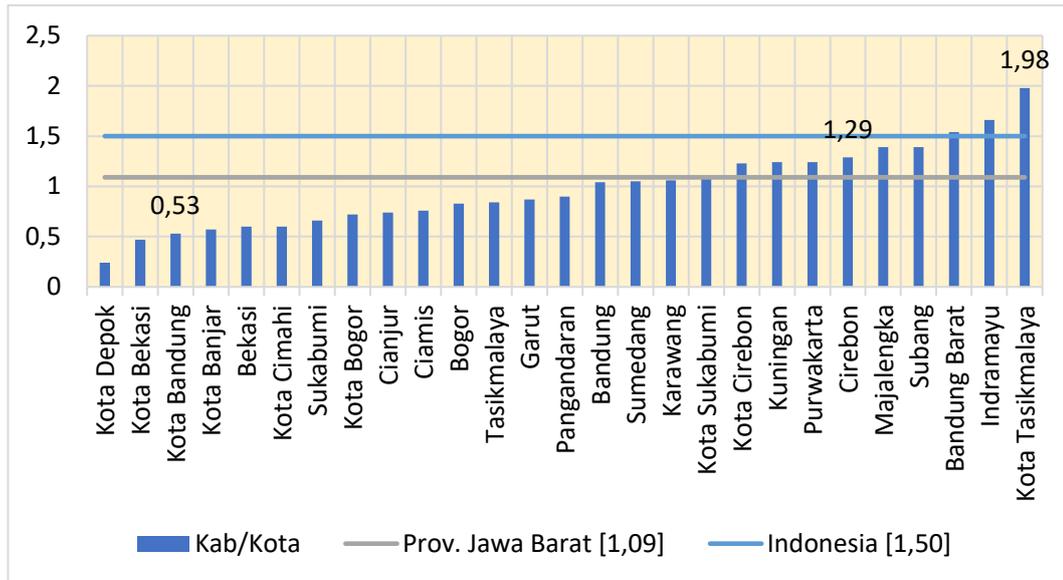
Gambar 2. 2 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Secara posisi, PO Kabupaten Cirebon menempati peringkat ke-5 tertinggi di Provinsi Jawa Barat setelah Kota Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka dan masih berada di atas nilai capaian Provinsi Jawa Barat dan nasional. Hal ini menandakan bahwa terkait kemiskinan, Kabupaten Cirebon masih menjadi pemberat Jawa Barat dan Nasional.

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index/P1*)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index/P1*) adalah Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai agregat dari *poverty gap index* menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai *poverty gap index*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program (Sirusa BPS).

Secara posisi, P1 Kabupaten Cirebon menempati peringkat ke-6 tertinggi di Provinsi Jawa Barat di bawah Kota Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang dan Kabupaten Majalengka. Sudah berada di bawah angka nasional tapi masih di atas angka Jawa Barat.

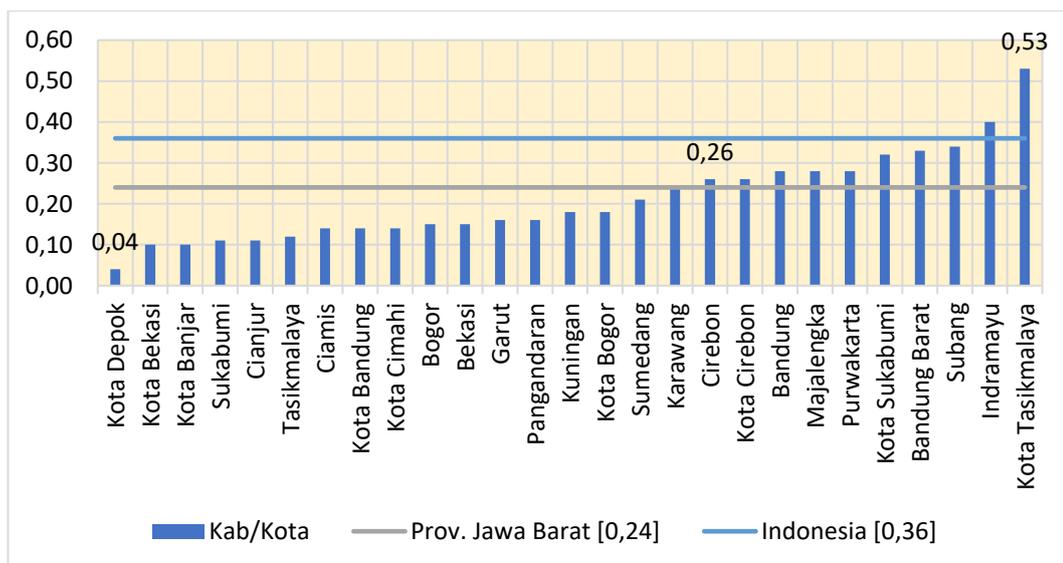


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar 2. 3 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

3. Indeks Keparahan Kemiskinan Poverty severity index (P2)

Indikator lainnya adalah indeks keparahan kemiskinan atau *poverty severity index* (P2) yaitu Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

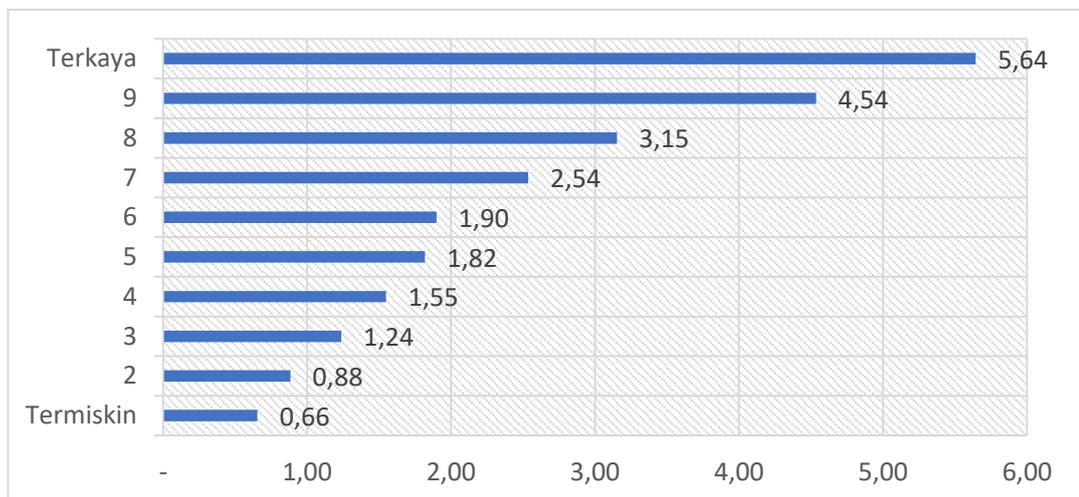
Gambar 2. 4 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019



Posisi P2 Kabupaten Cirebon menempati peringkat ke-10 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, angka ini sudah di bawah nilai nasional tapi masih berada di atas nilai capaian Provinsi Jawa Barat. Tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Cirebon masih relatif tinggi.

4. Ketimpangan

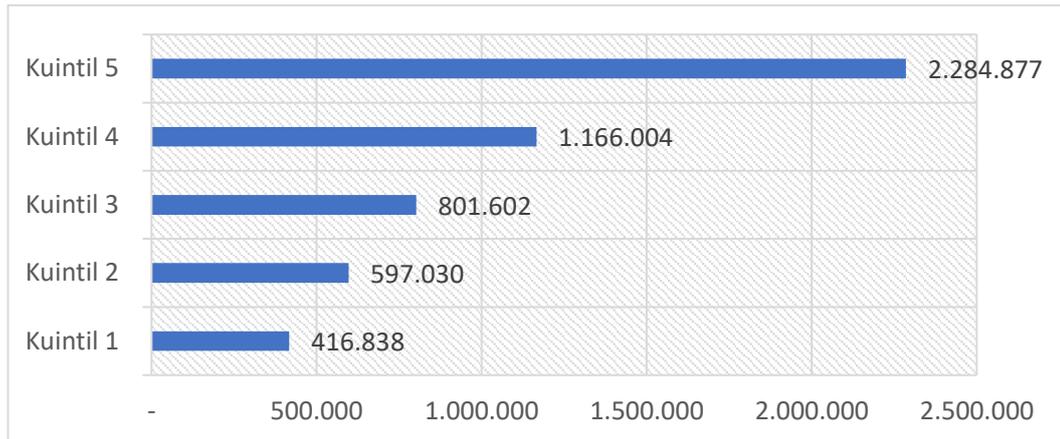
Selain kemiskinan, permasalahan pembanguan lainnya adalah ketimpangan. Secara rata-rata, pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Cirebon dari tahun 2009 ke tahun 2019 tumbuh sebesar 2.39 %. Akan tetapi, jika ditelusuri lebih dalam 18.9876 % penduduk Kabupaten Cirebon tumbuh di bawah rata-rata. Pertumbuhan pengeluaran per kapita antara penduduk berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah relatif sangat timpang, di mana penduduk 10% termiskin (desil 1) hanya bertumbuh sebesar 0.66 %, sementara penduduk 10% (desil 10) terkaya tumbuh hingga 5.64 %.



Sumber: Sepakat Bappenas

Gambar 2. 5 Kurva Insiden Pertumbuhan Kabupaten Cirebon Tahun 2009 - 2019 (GIC)

Data lainnya adalah adanya ketimpangan pengeluaran rata-rata perkapita pada setiap kelompok masyarakat yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Rata-rata pengeluaran perkapita pada kuintil 1 atau 20% termiskin hanya sebesar Rp 416.838 sedangkan pada kuintil 5 mencapai angka Rp 2.284.877 terlihat ketimpangan yang sangat tinggi antara kelompok di Kabupaten Cirebon.



Sumber: Sepakat Bappenas

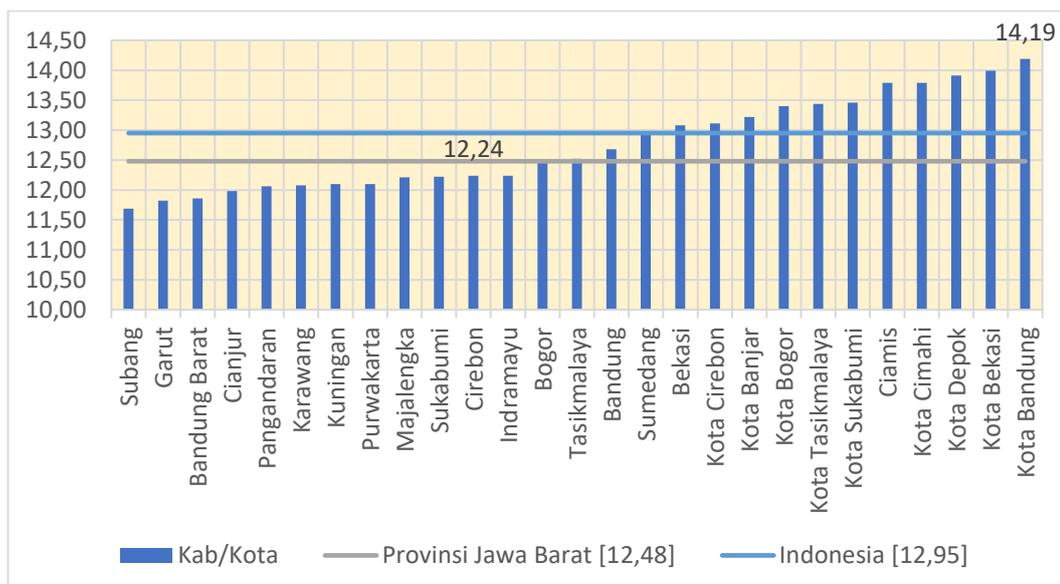
Gambar 2. 6 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Berdasarkan Kuintil Kabupaten Cirebon Tahun 2019 (Susenas)

2.2.2. Kondisi Kemiskinan Non Konsumsi

Selain diukur melalui tingkat konsumsi yang berbasis basic need approach, kemiskinan juga dapat diukur melalui dimensi lain yang dilihat pada berbagai sektor sebagai berikut.

1. Sektor Pendidikan

Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas utama dalam pembangunan nasional. Hal ini disadari karena pendidikan dipandang sebagai unsur utama dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



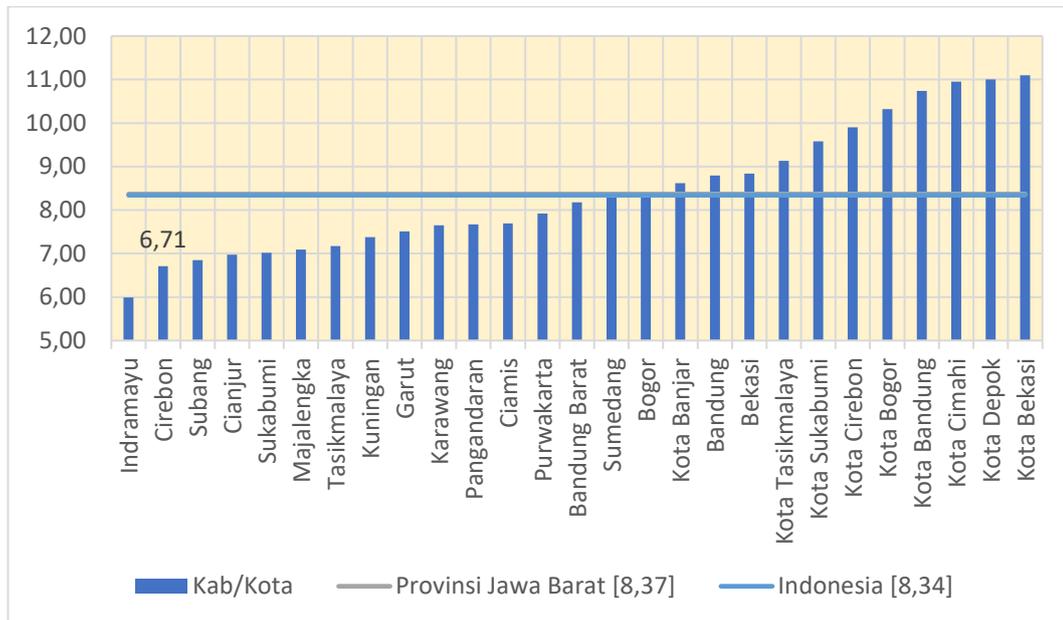
Sumber: BPS

Gambar 2. 7 Posisi Relatif AHLS Kabupaten Cirebon Tahun 2019



Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Angka harapan lama sekolah AHLS Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 sebesar 12,24 tahun, artinya penduduk Kabupaten Cirebon memiliki harapan untuk bersekolah sampai 12 tahun atau pada jenjang pendidikan menengah tingkat 2. Angka ini masih di bawah nilai capaian Provinsi Jawa Barat dengan 12,48 tahun dan Indonesia dengan 12,95 tahun.

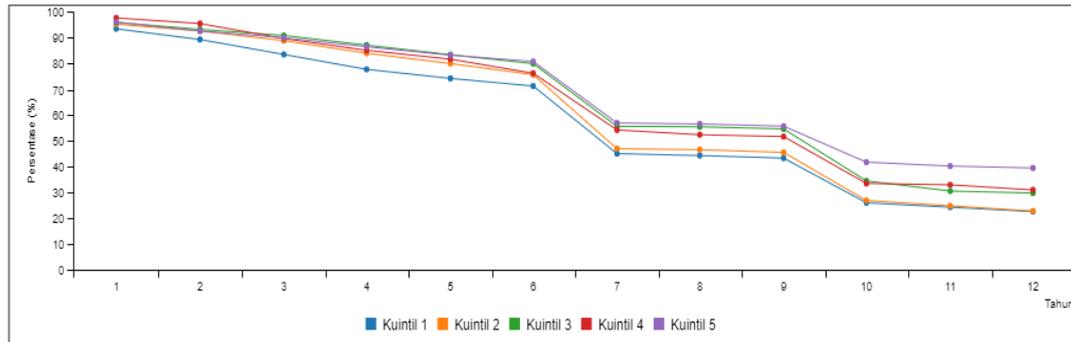


Sumber: BPS

Gambar 2. 8 Posisi Relatif RRLS Kabupaten Cirebon Tahun 2019

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ *Mean Years School* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Pada tahun 2019, RRLS Kabupaten Cirebon tercatat sebesar 6,71 tahun atau rata-rata penduduk Kabupaten Cirebon hanya sampai pada kelas 6 pendidikan dasar. Angka ini menempatkan Kabupaten Cirebon pada peringkat ke-2 terendah setelah Kabupaten Indramayu, angka ini masih berada di bawah nilai capaian Provinsi Jawa Barat dan Indonesia.

Masih rendahnya angka RRLS menunjukkan bahwa angka keberlanjutan penduduk masih cukup rendah terutama pada jenjang SMP menuju SMA dan sekolah menengah menuju pendidikan tinggi. Hal inipun tercermin dari indikator lain seperti APK /APM yang semakin tinggi jenjang semakin rendah angka partisipasinya.



Sumber: Sepakat Bappenas

Gambar 2. 9 Tingkat Keberlanjutan Sekolah Usia 15 tahun ke atas Tahun 2019 (Susenas) Kabupaten Cirebon

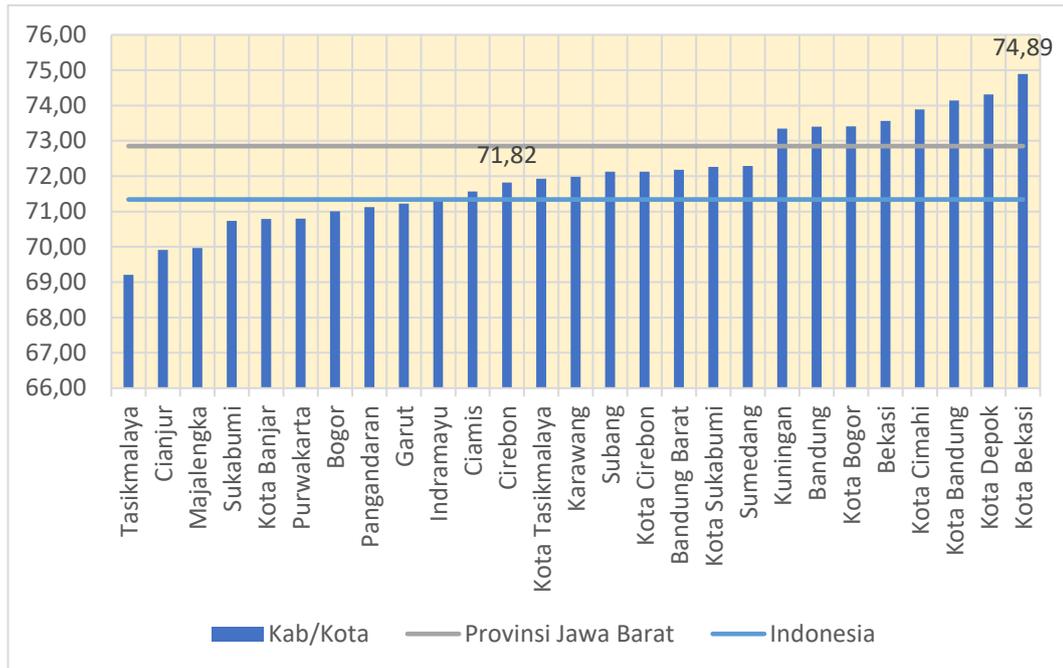
Gambar di atas menunjukkan bahwa tingkat keberlanjutan sekolah pada kelompok kuintil 1 dan 2 jauh di bawah kelompok kuintil 5, hal ini secara tidak langsung menggambarkan bahwa semakin sejahtera maka semakin besar kemampuan untuk melanjutkan.

2. Sektor Kesehatan

Sektor kesehatan akan sangat terkait dengan kemiskinan, orang akan cenderung miskin bila dalam keadaan sakit sebaliknya orang kaya yang sakit akan dapat jatuh miskin bila menderita penyakit yang kronis. Risiko sakit kronis pada kelompok dengan kesejahteraan rendah lebih besar dibandingkan dengan kelompok pendapatan tinggi.

a. Umur Harapan hidup

Umur Harapan Hidup Waktu Lahir (E0)(UHH) atau Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan dari bidang kesehatan khususnya. Umur Harapan Hidup ini dipengaruhi oleh angka kematian dan angka kesakitan. Secara umum AHH Kabupaten Cirebon terus meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2015 AHH tercatat sebesar 71,38 tahun kemudian terus meningkat secara presisten sampai dengan 71,82 tahun pada tahun 2019.



Sumber: BPS

Gambar 2. 10 Posisi Relatif AHH Kabupaten Cirebon Tahun 2019

Secara posisi nilai AHH Kabupaten Cirebon Sudah berada di atas nilai nasional namun masih di bawah angka Provinsi Jawa Barat. Daerah dengan nilai AHH tertinggi di Provinsi Jawa Barat adalah Kota Bekasi dengan 74,89 tahun jauh di atas nilai Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

b. Ketersediaan Sarana Kesehatan

Sebaran keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Cirebon bagian timur ada RSUD Waled di Kecamatan Waled, sebagai wilayah perbatasan dengan Kabupaten Kuningan dan wilayah Provinsi Jawa Tengah. Satu RSUD lainnya yaitu RSUD Arjawinangun ada di bagian barat wilayah Kabupaten Cirebon mendekati wilayah perbatasan dengan Kabupaten Indramayu. Rumah Sakit Paru Sidawangi milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat berada di lokasi perbatasan Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka.

Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) adalah salah satu wujud nyata peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan. UKBM diantaranya Posyandu, Polindes, Desa Siaga. UKMB lainnya adalah Polindes, POD, Pos UKK dan lain-lain yang berkembang di masyarakat atas peran serta dan inisiatif masyarakat. Tahun 2019 Jumlah Posyandu seluruhnya 2.634 buah meningkat dari tahun 2018 yang berjumlah 2.618 unit.

Jumlah posyandu aktif tahun 2019 mencapai 58 %. Berdasarkan strata, posyandu Pratama tidak ada, Madya 1.105 buah (42 %) , Purnama 1.165 buah (44,2 %), dan Mandiri 364 buah (13,8 %). Jumlah Posbindu PTM yaitu Pos



Pelayanan Terpadu untuk penanggulangan penyakit tidak menular tahun 2019 terdapat 397 buah.

c. Kematian Ibu dan Bayi

Angka kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) menggambarkan besarnya risiko kematian ibu pada fase kehamilan, persalinan dan masa nifas di antara 100 ribu kelahiran hidup dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Pada tahun 2019 jumlah kematian ibu sebanyak 34 ibu dari 48.414 kelahiran hidup dengan penyebab eklamsi 15 kasus (44,1 %), perdarahan 7 kasus (17,6 %), gangguan system peredaran darah (jantung , Stroke) 5 kasus (14,7 %), infeksi 2 kasus (5,9 %) dan lain-lain 6 kasus (17,6 %).

Pada tahun 2019 jumlah kematian bayi yang dilaporkan di Puskesmas sebanyak 127 terdiri dari 109 kasus, kematian neonatal (bayi usia 0-28 hari) dan kematian post neonatal (bayi usia 29 hari-11 bulan) sebanyak 18 kasus. Jika dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 48.414 maka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup adalah 2,12 per 1000 kelahiran hidup.

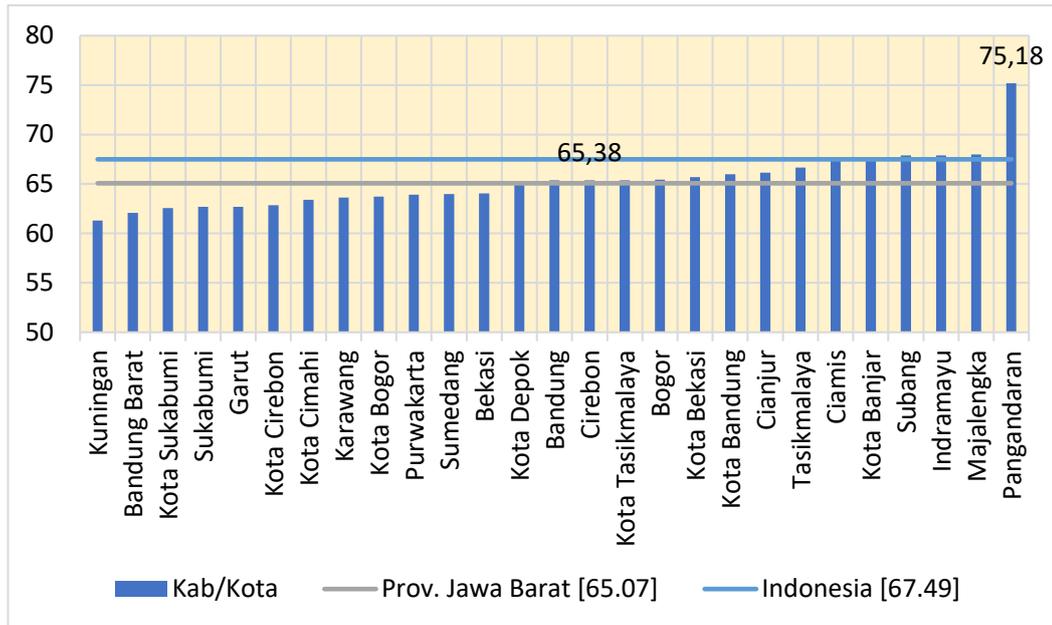
Penyebab kematian neonatal tertinggi adalah Asfiksia sebanyak 42 kasus (38,5 %), BBLR 40 kasus (36,7,0%), kelainan kongenetal 15 kasus (13,8 %), dan lain-lain 3 kasus (11 %). Sedangkan penyebab kematian pada post neonatal karena Pneumonia sebanyak 3 kasus (16,7 %), kematian karena kelainan saluran cerna 2 kasus (11,1 %) dan lain-lain 13 kasus (72,2 %)

3. Sektor Ketenagakerjaan

Sektor ketenagakerjaan memiliki peran yang penting dalam penanggulangan kemiskinan, sektor ini diharapkan dapat membantu mendistribusikan angkatan kerja agar dapat terserap lapangan kerja. Sektor ketenagakerjaan berfokus kepada upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. Besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah, Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.



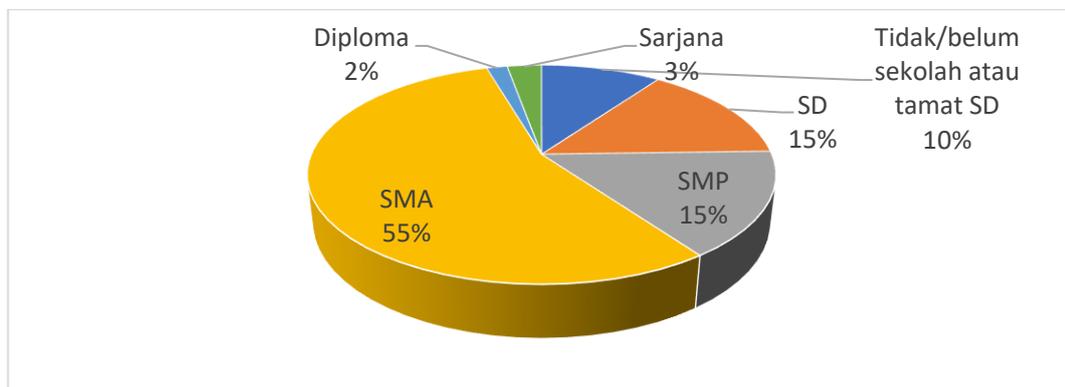
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar 2. 11 Posisi Relatif TPAK di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Pada tahun 2019, TPAK Kabupaten Cirebon sebesar 65,38 persen artinya dari 100 orang dari angkatan kerja 65 orang diantaranya tersedia untuk untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

b. Tingkat Pengangguran terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Pada tahun 2019, TPT Kabupaten Cirebon menempati peringkat pertama tertinggi di Provinsi Jawa barat dengan 10,28 % angka ini jauh di atas nilai TPT Provinsi Jawa Barat dengan 7,99 % dan Indonesia dengan 5,28 %.

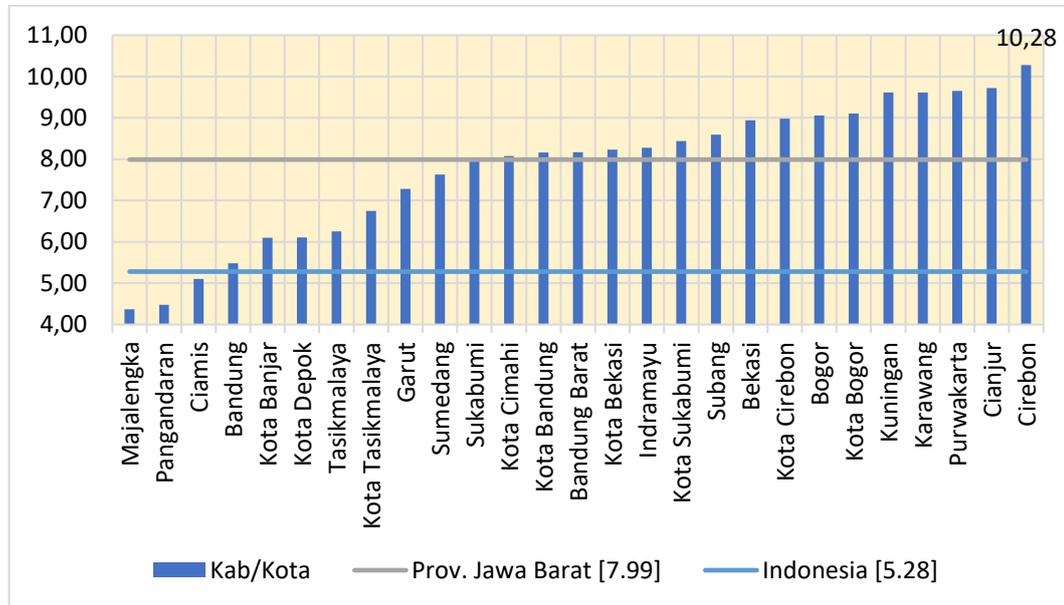


Sumber: Sepakat Bappenas

Gambar 2. 12 Penduduk Menganggur Terbuka Tingkat Pendidikan Tahun 2019 (Sakernas) Kabupaten Cirebon



Tingginya TPT Kabupaten Cirebon salah satunya disebabkan karena kualitas pencari kerja yang masih rendah, dari gambar 3-12 di atas terlihat bahwa mayoritas (55 %) berpendidikan SMA diikuti oleh SD dan SMP dengan 15%. Belum tercipta link and match antara lembaga pendidikan dan dunia usaha dan industri.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

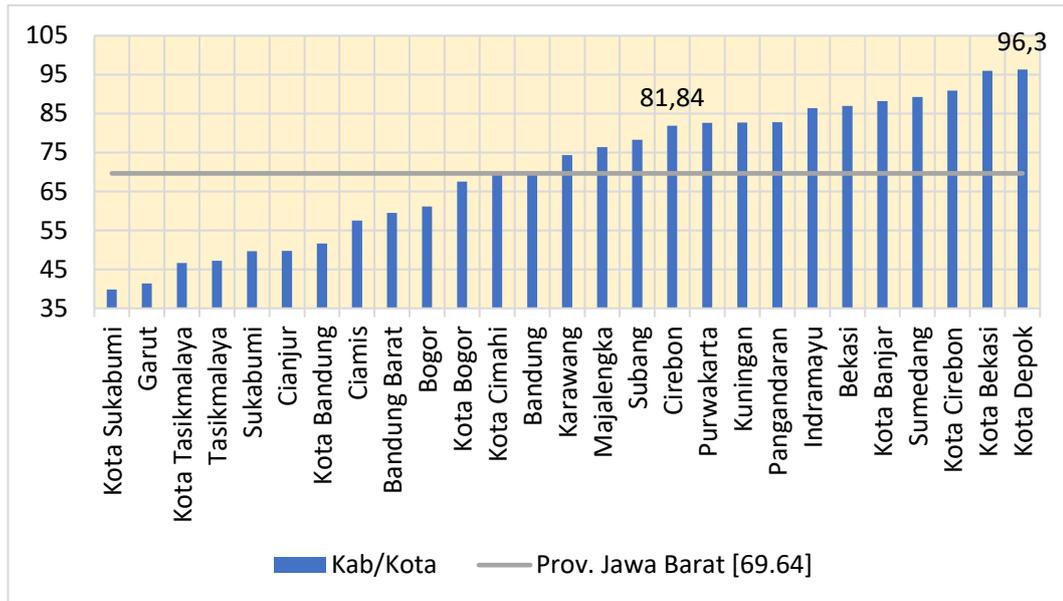
Gambar 2. 13 Posisi Relatif TPT di Provinsi Jawa Barat tahun 2019

Selain rendahnya tingkat pendidikan penganggur, permasalahan tingginya angka pengangguran adalah tingkat keterampilan pencari kerja, data susenas menunjukkan bahwa 60% terlatih namun 40 % tidak terlatih. Sertifikasi keterampilan menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam menurunkan angka pengangguran, pendidikan rendah dapat diimbangi dengan pemberian keterampilan yang tersertifikasi.

4. Sektor Infrastruktur Dasar

Sektor infrastruktur dasar didorong untuk mendukung penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan infrastruktur dan sarana pelayanan publik terutama bagi penduduk miskin. Pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan seperti air minum layak, sanitasi dan pemukiman menjadi hal yang sangat krusial bagi penduduk miskin.

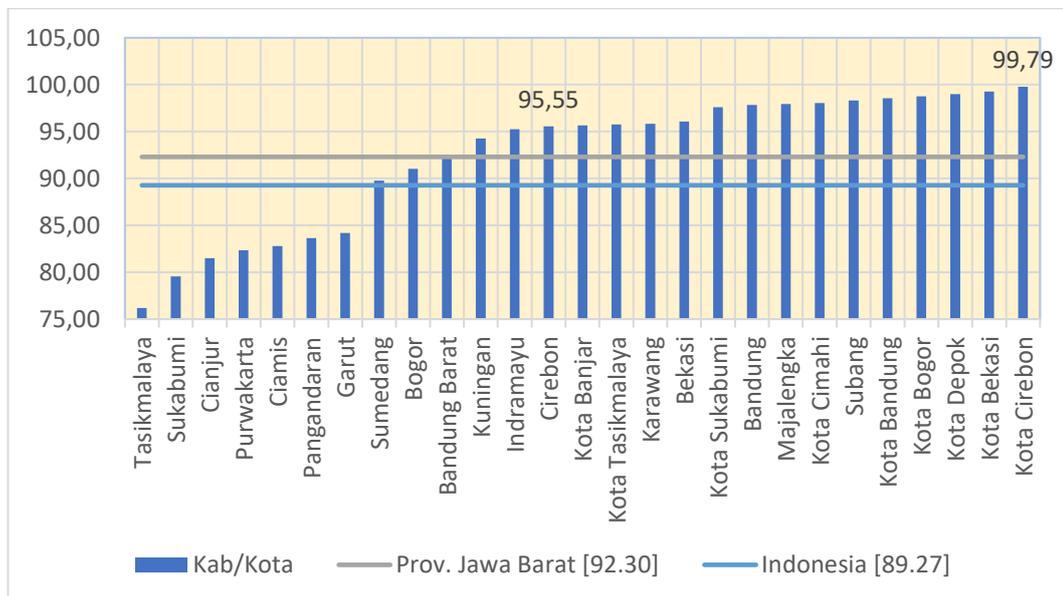
RT dengan Sanitasi Layak Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 sebesar 81,84 % angka ini sudah berada di atas nilai capaian Provinsi Jawa Barat dengan 69,94 %. Hal ini masih menunjukkan bahwa masih ada 18,16 % RT yang belum mengakses sanitasi layak.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar 2. 14 Posisi Relatif Persentase RT dengan Sanitasi Layak di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Persentase RT dengan Air Minum Layak Kabupaten Cirebon tahun 2019 sudah cukup tinggi yaitu 95,55 % angka ini sudah berada di atas nilai capaian Provinsi Jawa Barat dan Indonesia.



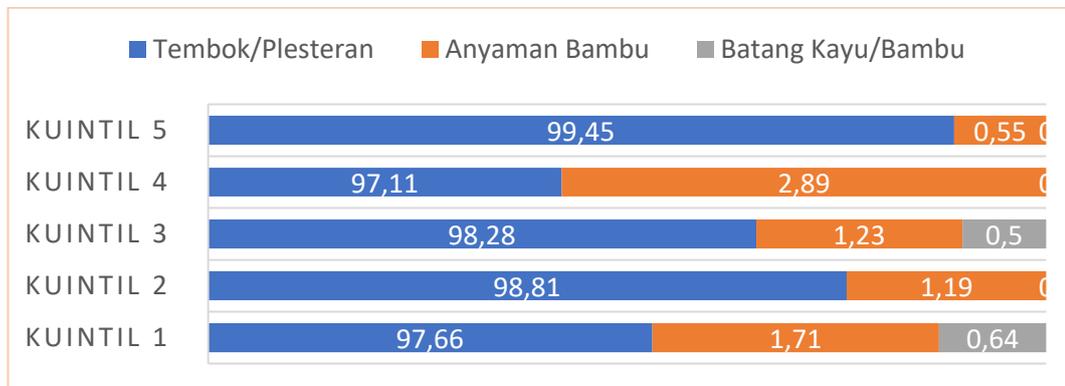
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Gambar 2. 15 Posisi Relatif Persentase RT dengan Air Minum Layak di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Dilihat dari penggunaan bahan pada hunian berupa atap, dinding dan lantai, kondisi pada kelompok kuintil 1 atau penduduk miskin dan sangat miskin terlihat



masih menggunakan bahan yang berkualitas rendah terutama pada penggunaan lantai dan dinding, sedangkan atap mayoritas sudah menggunakan genteng.



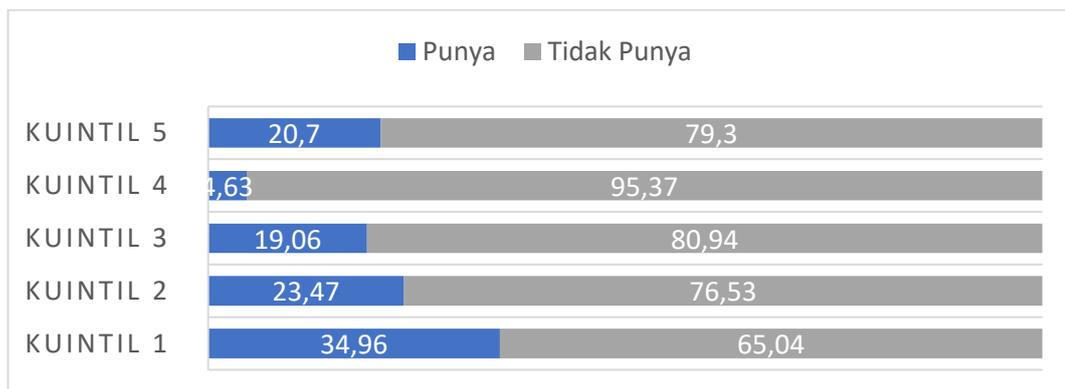
Sumber: Sepakat Bappenas

Gambar 2. 16 Persentase Penggunaan Bahan Baku Dinding

Kualitas hunian pada kelompok penduduk miskin masih ada yang menggunakan atap, dinding dan lantai berbahan buruk (asbes, anyaman bamboo/batang kayu dan kayu/bamboo/tanah)

5. Sektor Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial menjadi sangat penting dalam penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial berperan sebagai pelindung masyarakat dari guncangan seperti guncangan ekonomi dan guncangan sosial. Saat ini dikenal dengan bantuan sosial dan jaminan sosial, bantuan sosial terkait dengan non kepesertaan sedangkan jaminan sosial terkait dengan kepesertaan.



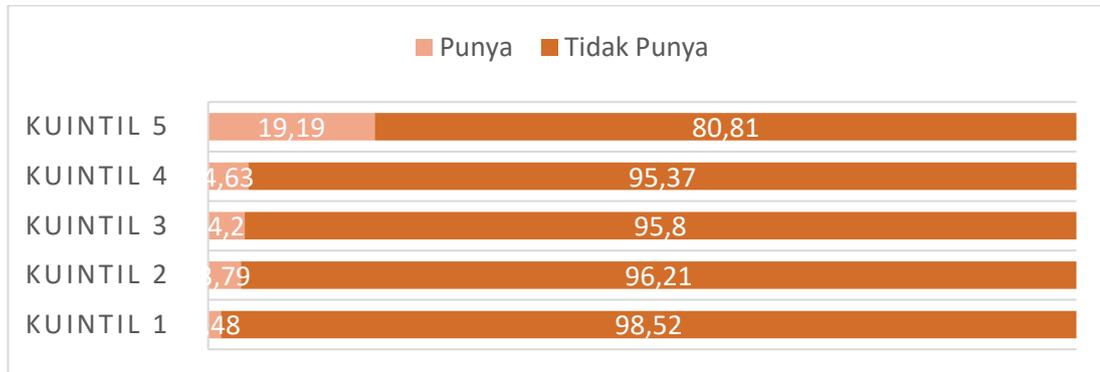
Sumber: Sepakat Bappenas

Gambar 2. 17 Persentase Penduduk dengan Kepemilikan Setidaknya Memiliki Satu Jaminan Sosial

Dari gambar di atas terlihat bahwa pada kuintil 1 persentase penduduk yang memiliki jaminan sosial cukup tinggi hal ini disebabkan adanya jaminan sosial yang



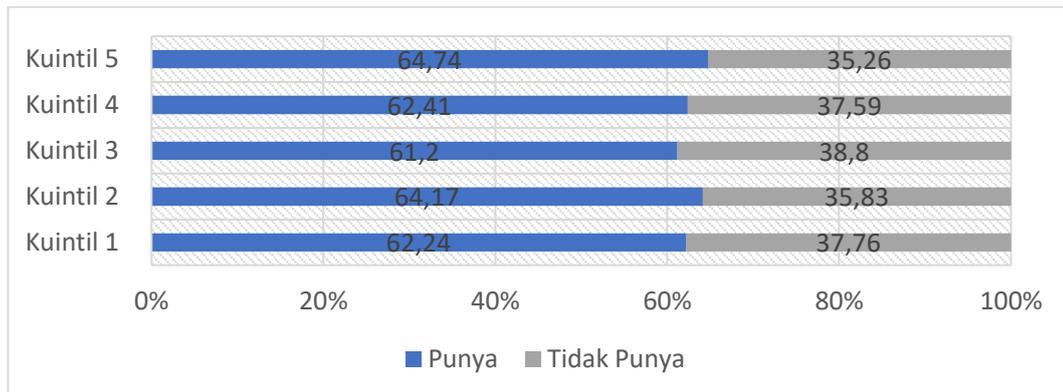
menyasar penduduk miskin dan sangat miskin, sedangkan yang paling sedikit kepemilikannya adalah pada kelompok kuintil 4.



Sumber: Sepakat Bappenas

Gambar 2. 18 Persentase Kepemilikan Jaminan Pensiun Menurut Kuintil Tahun 2019

Jenis jaminan sosial yang paling rendah dimiliki oleh masyarakat adalah jaminan pensiun, pada kuintil 1 hanya 1,48 % yang memiliki jaminan pensiun sedangkan pada kuintil 5 kepemilikan jaminan pensiun hanya sebesar 19,19 %.



Sumber: Sepakat Bappenas

Gambar 2. 19 Setidaknya Memiliki Satu Jaminan Kesehatan

Persentase kepemilikan jaminan kesehatan pada kelompok kuintil 1-5 terlihat relatif merata dengan persentase kepemilikan pada rentang 61-65 %. Hal ini menandakan cakupan jaminan kesehatan terutama jamkesda sudah cukup baik, namun belum berhasil mencapai *universal health coverage* (UHC). Permasalahan lainnya adalah kepesertaan perlindungan sosial bagi penduduk yang bekerja pada sektor non formal.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pengumpulan Data

Beberapa data yang digunakan untuk melakukan riset baik data primer maupun sekunder. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner kepada penduduk yang terdampak pandemi Covid-19. Sedangkan data sekunder bersumber dari beberapa dokumen:

1. Indikator kemiskinan konsumsi yang bersumber dari Susenas BPS
2. Indikator kemiskinan non konsumsi yang bersumber dari data susenas BPS
3. Indikator kemiskinan ikro yang bersumber dari DTKS
4. Laporan penanggulangan kemiskinan TKPKD, ataupun pihak lain di luar pemerintah seperti Filantropi Bisnis maupun lembaga sosial masyarakat lainnya.

3.2. Metode Analisis Data

Metode analisis data diolah menggunakan mix method. Analisis deskriptif menggunakan berbagai tools, kuesioner penelitian menggunakan numerical scale serta Focuss Group Dicusiion.

3.3. Populasi dan Sample

Kuesioner akan disebarakan terhadap penduduk yang terdampak Covid-19 yang masuk dalam DTKS Kabupaten Cirebon dan kemudian dipilih sample menggunakan rumus slovin.



